



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 4 (Empat)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : Pukul 10. 41 s.d 12.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F- PG)
Acara : 1. RKA KL Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran);
2. Pelaksanaan anggaran s.d triwulan II TA 2023;
3. Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (*Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa.
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
37 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**

10 dari 12 orang Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E., M.B.A.
3. Rieke Diah Pitaloka
4. ST. Ananta Wahana, S.H.
5. Sonny T. Danapramita
6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
7. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
8. Sondang Tiar Debora Tampubolon
9. dr. H. Mufti N. Anam
10. Dr. Ir. Harris Turino, M. Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F- PG)**

6 dari 7 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.

2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

5 dari 8 orang Anggota

1. Khilmi
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
3. H. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.
4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

5 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M
3. M. Syamsul Luthfi, S.E.
4. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
5. H. Subardi., S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

3 dari 6 orang Anggota

1. H. M. Nasim Khan
2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
3. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Rafli
2. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

3 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

Menteri Perdagangan RI (Zulkifli Hasan, S.E., M.M.)
beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat dan selamat datang pada Menteri Perdagangan RI, Bapak Zulkifli Hasan
beserta seluruh jajaran,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya kita hari ini dapat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Menurut laporan Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 12, 13 anggota, 1 izin, dan 6 fraksi, kuorum anggota belum terpenuhi, tapi kuorum fraksi sudah terpenuhi.

Saya buka dulu, nanti kalau kita lihat kuorumnya, kalau belum kuorum kita tunda 5 menit. Saya buka rapat kerja kali ini dan saya nyatakan rapat terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.41 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Secara fraksi sudah memenuhi kuorum 6 fraksi, tapi anggota belum kuorum. Karena ini mengambil keputusan, saya mengusulkan kita skorsing sambil *nunggu* anggota selama 5 menit, Pak Menteri, kalau boleh, saya skorsing selama 5 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.41 WIB)

Baik, karena sudah ada penambahan anggota, Pak Eko sudah datang, skorsing saya cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.43 WIB)

Pak Eko.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Saya juga minta persetujuan, rapat kita agendakan sampai jam 12.30, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perdagangan RI atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas mengenai:

1. RKA K/L tahun anggaran 2024,
2. Pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023, dan
3. Pembahasan perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa.

Dapat kami sampaikan bahwa Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja tanggal 6 Juni 2023, telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp1.954.848.108.000,00 serta usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan RI tahun 2024 sebesar Rp317 miliar untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir.

Selanjutnya berdasarkan Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI, anggaran Kementerian Perdagangan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 1.954,7 miliar, yang terdiri atas program perdagangan dalam negeri sebesar 272,4 miliar, program perdagangan luar negeri sebesar 293,0 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar 1.389,4 miliar.

Dalam rapat kerja hari ini, diharapkan terdapat gambaran terkait rencana kerja anggaran dan prioritas program Kementerian Perdagangan untuk tahun 2024 dan progres penyerapan anggaran, dan kinerja Kementerian Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Kemudian terkait dengan rencana pengesahan protokol perubahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk penggabungan ketentuan-ketentuan perdagangan jasa, dalam rapat kerja tanggal 6 Juni 2023, Pemerintah mengharapkan pengesahan persetujuan protokol perubahan CEPA dengan Chile menggunakan instrumen peraturan presiden. Terkait hal tersebut, kami meminta kepada Menteri Perdagangan untuk memberikan pandangannya terkait hal tersebut.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri Perdagangan RI untuk menyampaikan paparannya, sesuai dengan agenda yang ada.

Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Ketua yang terhormat,
Para Anggota Komisi VI yang terhormat,

Alhamdulillah kita syukuri pagi ini bisa mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat *wal aflat*. Satu kehormatan bagi kami dapat bertatap muka dengan yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih juga yang setinggi-tingginya, undangan dari Komisi VI DPR RI untuk melakukan rapat kerja dalam rangka Pembahasan mengenai RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan Anggaran Triwulan II tahun anggaran 2023, serta pembahasan rencana perdagangan ratifikasi RI-Chile. Mohon maaf suaranya serak, Pak Ketua, belum sembuh dari ISPA ini.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan karena Cak Imin pergi, kan? Bukan ya?

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M):

Khusus Evita, terima kasih, saya di WA doanya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ulang tahun, Pak Menteri? Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M):

Aamiin, *makasih*.

Sebelum kami menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2024, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2023. Adapun realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.350.282.239.319,00 atau 50,15% dari total pagu Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.448.594.368.000,00. Realisasi anggaran secara detail per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut, ada tabelnya, Pak.

Masih rendahnya realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tersebut disebabkan dana tugas pembantuan berupa pembangunan revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp192,9 miliar dilaksanakan di daerah masih dalam proses pembangunan, daerah yang masih membangun. Terdapat target kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan pihak ketiga, seperti pelaksanaan sidang dan pameran internasional, TEE nanti bulan Oktober, *trade expo*. Anggaran yang terkena *automatic adjustment* saat ini baru dalam proses buka blokir sebesar 89,5 miliar.

Rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2024. Dalam rangka mendukung prioritas nasional Kementerian Perdagangan telah menyusun sasaran strategis tahun 2024 yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2024.

Beberapa sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut, walaupun anggaran kita turun banyak, Pak Ketua, dari 2,5 hampir

sekarang 1,9, itu yang memprihatinkan sebetulnya teman-teman yang menjadi atase itu ada 40 berapa, 56 negara, itu kasihan.

1. Mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan, dan indikator inflasi pangan bergejolak dengan target 3 (+/-) 1.
2. Mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang tertib serta bertanggung jawab dan indikator dengan target indeks 64.
3. Meningkatkan pasar produk dalam negeri dengan indikator pertumbuhan sebesar perdagangan besar dan eceran tapi bukan mobil dan sepeda motor, tapi PDB dengan target 6.
4. Mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas dengan indikator, pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan target 73%, nilai resi gudang yang diterbitkan dengan target 15%, realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas dengan target 7%.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas bernilai tambah dan jasa dengan indikator, neraca perdagangan dengan target 31,6 sampai 53,4 miliar USD, ekspor non migas dengan target 6,4%, PTA/FTA/CEPA yang disepakati dengan target 34 kesepakatan.
6. Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, profesional. dengan indikator-indikator indeks reformasi birokrasi dengan target indeks 85.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional SK 287 MK 2023 realisasi pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dana alokasi tahun anggaran 2024, dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2024 Kementerian Perdagangan mendapat pagu tadi saya sampaikan Rp1.954.667.229.000,00. Pagu anggaran tersebut turun pada pagu PNBP sebesar Rp180,879 miliar. Maka pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2024 turun sebesar Rp493.927.139.000,00. Jadi hampir, hampir 500 triliun eh 500 miliar turunnya, ada rincian di atas.

Rencana perdagangan ratifikasi RI-Chile.

Bapak, Ibu Pimpinan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Selanjutnya perkenankan kami menjelaskan terkait pengesahan persetujuan protokol perubahan CEPA dengan Chile. Pertemuan pada hari ini merupakan pertemuan kedua setelah rapat kerja pertama tanggal 6 Juni 2023. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan *urgency* pengesahan persetujuan protokol perubahan CEPA dengan Chile. Inisiasi perdagangan Indonesia-Chile CEPA dimulai 2014. Kedua negara sepakat melalui perundingan perdagangan barang. Selanjutnya pasca perdagangan berlaku, kedua negara sepakat untuk melanjutkan dengan melakukan perundingan perdagangan jasa, jadi dulu hanya barang, sekarang plus jasa. Indonesia-Chile CEPA perdagangan barang ditandatangani 14 Desember 2017 dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019. Pasca Indonesia-Chile CEPA bidang perdagangan barang berlaku, terjadi peningkatan signifikan. Dalam hal ini, total nilai perdagangan kedua negara sejak 2019-2022 tumbuh 112%, kemudian utilisasi permohonan *form* surat keterangan asal barang Indonesia-Chile CEPA tercatat meningkat tajam, di mana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 697 *form*, namun pada tahun 2022 bertambah menjadi 8.344 formulir.

Dalam, dengan mempertimbangkan hubungan perdagangan dua negara yang menunjukkan peningkatan positif, kedua negara sepakat melakukan perundingan sektor perdagangan jasa, diluncurkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Perundingan perdagangan Indonesia-Chile CEPA bidang jasa dilakukan relatif singkat, 1 tahun 11 bulan. Mengingat pernah terjadi saat pandemi Covid, sehingga mayoritas perundingan dilakukan secara virtual, proses pengesahan perubahan Indonesia-Chile CEPA untuk penggabungan ketentuan perdagangan jasa telah dimulai sejak 21 Maret 2023 melalui penyampaian surat Presiden ke DPR. Pemerintah mengharapkan rekomendasi-rekomendasi DPR RI atas pengesahan protokol perubahan Indonesia-Chile CEPA untuk penggabungan ketentuan-ketentuan perdagangan jasa dapat diputuskan pada kesempatan pertama sehingga proses ratifikasi dapat selesai akhir 2023.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Agar manfaat protokol perubahan Indonesia-Chile CEPA bidang jasa bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia segera, maka penting agar proses pengesahan dapat dilakukan tepat waktu. Pada Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa "Keputusan perlu tidaknya persetujuan DPR terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah dilakukan paling lama 60 hari kerja pada masa sidang. Mengingat 60 hari kerja pada masa sidang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2023, kami, maka kami harapkan agar dalam rapat kerja ini dapat diputuskan pengesahan perjanjian protokol perubahan Indonesia-Chile CEPA, ketentuan-ketentuan bidang jasa melalui instrumen peraturan presiden.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

Demikian penyampaian kami secara singkat mengenai pembahasan-pembahasan RKA K/L Kementerian Perdagangan tahun 2024, pelaksanaan anggaran triwulan II tahun anggaran 2023, serta rencana perdagangan ratifikasi RI-Chile. Izinkan kami untuk memohon dukungan pada seluruh Pimpinan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2024.

Akhir kata, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Menteri, atas penjelasannya.

Kita ada tiga agenda hari ini, salah satunya tentang CEPA untuk Chile. Saya mengusulkan saja ini, mengusulkan saja, karena tidak ada yang terlalu serius juga tentang ratifikasi ini dan tahun 2017 ratifikasi induknya itu sudah melalui perpres, maka *addendumnya* ini kan, tambahannya ini, Pak Menteri mengusulkan melalui perpres juga, ya. Saya mengusulkan, kalau anggota setuju, nanti kita selesaikan terlebih dahulu, karena dulu sudah dengan perpres, masuk akal, dan rasanya selevel juga kalau *addendumnya* juga dengan

perpres. Kalau boleh, biar *enggak* terlalu berlarut-larut, kita ambil keputusan terlebih dahulu untuk CEPA ini atau ada pandangan lain? Bu Evita biasanya ada pandangan?

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ratifikasi ini kan sebenarnya sudah lama ya, 2017 dan apa namanya, disetujuinya 2019. Dan ini revisinya kan hanya protokolnya sebenarnya, bukan *whole* apa namanya, *agreement* ini. Dan kalau dulu, bukan protokolnya saja hanya dengan perpres *gitu loh*, *kenapa* sekarang kita harus dengan undang-undang di DPR? Jadi saya sepakat ya kita setuju saja berdasarkan dengan perpres saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke. Bisa kita setuju ya, atau Pak Menteri *enggak* setuju? Oh setuju ya, saya pikir kita setuju, Pak Menteri *enggak* setuju, kan *enggak*..

Baik, langsung kita ambil keputusan saja, untuk CEPA Chile ini kita setuju dengan perpres, ratifikasinya *addendumnya*, dan Pak Menteri bisa langsung memproses ini ke Sekretaris Negara.

(KETUK PALU 1 KALI)

Cepat Pak Menteri ini, Pak Menteri, *enggak* pakai *lobby*, *enggak* pakai apa, Pak Menteri. Kata Pak Harris ini karena koalisinya *udah* mantap, katanya.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Kami persilakan untuk melakukan pendalaman atas dua agenda yang lain atau mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Pak Menteri, mengingat *urgency*-nya, kami persilakan saja. Pertama dari, oh sebelah kanan ini, Pak Mufti Anam.

F- PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, kami sampaikan selamat ulang tahun, Pak Menteri, semoga terus menginspirasi kami semua. Yang kedua, kami sampaikan apresiasi buat Pak Menteri, karena sejujurnya, kita jauh di mata tapi dekat dihati, saya ini pengikutnya Pak Menteri di *medsos*. Jujur *medsos* Pak Menteri, inspirasi buat kami, Bapak walaupun mungkin jauh lebih tua dari kami tapi penampilannya muda, *gercep* begitu, terus sering-sering turun juga ke bawah begitu, Pak, serius, *enggak*, benar-benar.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Itu namanya, Koalisi Indonesia Maju.

F- PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Indonesia Maju.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau muji-mujinya terlalu tinggi, hati-hati, Pak Menteri.

F- PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Termasuk soal kalau kita amati kemarin, biasanya kalau ada peningkatan harga bahan pokok itu berlarut-larut di kementerian yang lama, Pak, tapi kemarin contohnya saja minyak, apa, harga ini, harga telur, misalnya. Satu ini harga di produsen sempat harga 18.500, kemudian di konsumen harga 32 ribu, tapi saya lihat tidak, itu tidak berlarut lama, karena saya lihat Pak Menteri turun di lapangan, kemudian hari ini hanya terpaut sedikit, sehingga kami apresiasi soal hal itu, termasuk bahan-bahan pokok lain begitu, Pak. Kalau soal, Pak, beras, ya kita bisa memaklumi lah karena memang sekarang opini di dunia sedang, sedang, apa, terjadi persoalan itu, begitu. Tapi kami rasa masih dalam tahap wajar begitu, Pak. *Cuman* kami berharap soal beras ini dengan tangan dingin Pak Menteri, nanti bisa segera diselesaikan, Pak.

Nah, kemudian *menanggapi* soal paparan Pak Menteri di halaman 4, begitu, Pak. Kami *pengen* tanya soal apa namanya, apakah sudah ada, Pak, pengukuran mengenai *kontribusi* antara pasar fisik dan pasar digital? Karena kalau kami lihat di Kementerian Perdagangan, tentunya di sebelum-sebelumnya, Pak Menteri, ini fokusnya hanya di pasar fisik. Tapi kalau kita lihat hari ini, Pak, Tanah Abang, ITC, Roxy, dan lain sebagainya, sepi, Pak. Kemarin lalu kami ke Tanah Abang, begitu lihat apa, meng-*cross check* apa yang ada di berita, ternyata betul, Pak, pendapatan mereka yang biasanya per hari omset 400, 40 juta, sekarang hanya tinggal 9 juta, Pak, per hari. Tragis sekali. Bahkan mereka khawatir dalam beberapa tahun ke depan, mau tutup, begitu.

Kemudian kami *mencermatin*, Pak, semakin dalam, ternyata salah satu penyebabnya adalah *e-commerce*. Bahkan hari ini kalau kita mau teliti lebih dalam, kita dalam ancaman namanya *social commerce* kalau kita sebut saja namanya Tiktok, Pak. Tiktok ini sangat berbahaya sekali di lingkungan kita. Masyarakat kita diberikan ruang untuk *live* jualan produk, kemudian yang laku-laku ini, Pak, sama mereka dikloning, Pak. Jadi mereka punya semacam AI (*Artificial Intelligent*) dan kemudian mereka mengirim orang, mengecek tempat produksi dan kemudian belum seminggu barang yang di *launching* itu, Pak, sudah diproduksi di China dan sudah ada di negara kita, Pak. Banyak sekali UMKM kita yang mengeluh, ketika dia produknya laku berjuta-juta, kemudian di minggu berikutnya ada produk yang mirip, persis, kualitasnya sama, Pak, tapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah, Pak Menteri.

Nah, ini harapan kami bisa menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan, bisa dimasukkan dalam indikator ini, Pak. Karena kami lihat kami sangat senang sekali, Pak Menteri, kami lihat dibanyak pernyataannya bahwa akan membuat *positive list*, Pak. *Nah*, *positive list* ini harapan kami, juga bisa duduk bersama dulu dengan Kementerian Perindustrian, karena kami tidak mau Kemendag dalam membuat *positive list* hanya berdasarkan apa namanya, dari *e-commerce*-nya, begitu. Kalau *e-commerce* bisa saja untuk memberikan data yang tidak tepat dan sebagainya.

Kenapa perlu duduk bersama dengan Kementerian Perindustrian? Dalam rangka menanyakan, mendata, produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri apa? Yang tidak bisa diproduksi apa, Pak? Maka yang tidak bisa diproduksi lah yang itu kemudian dijadikan, apa, acuan barang yang bisa diimpor. Dan tidak perlu lagi ada apa namanya, batas yang di bawah 1,5 juta dan sebagainya. Saya setuju dengan sepakat dengan ada *positive list*, tapi semangat dari Pak Teten bagaimana ini diproteksi, itu juga kami apresiasi.

Kemudian yang selanjutnya, Pak, kami melihat bahwa persoalan refraksi dari teman-teman Aprindo ini, Pak, ini perlu menjadi perhatian. Mungkin, ya saya bisa memahami Pak Menteri orangnya sangat hati-hati, betul, bagus, Pak, di Kementerian Perdagangan hati-hati begitu. Tapi ini ada soal persoalan besar yang bagaimana integritas bangsa kita dipertaruhkan, Pak. Bayangkan di tengah hanya minyak harga minyak goreng dulu tinggi bahkan *enggak* ada di pasaran, Pak, itu pahlawannya itu Aprindo, *loh*, Pak. Di pasar-pasar, minyak goreng *enggak* ada, tapi di Alfamart, di Indomaret, di retail-retail modern, itu ada. Di pasaran ada, harganya mahal, tapi yang bisa menstabilkan adalah teman-teman Aprindo. Maka jasa menurut kami, pahlawan pasar ini, pahlawan minyak goreng kami bisa katakan ini harus, harus di ini, Pak, harus dijaga begitu. Jangan sampai kemudian ini tidak dibayar, yang kemudian berikutnya tiba-tiba harga CPO naik, kemudian minyak goreng naik, mereka tidak mau lagi, apa namanya, terlibat dalam urusan kebijakan dengan pemerintah begitu, Pak. *Nah*, maka ancaman produsen soal *stop* jual minyak goreng ini bisa menjadi perhatian serius, agar bagaimana ini bisa diselesaikan. *Toh* bisa saja kan, Pak, bayar 344 miliar tidak pakai duit negara, bisa aja dengan duit BPDPKS. Biar duit BPDPKS tidak hanya untuk menyubsidi apa, bio solar, itu yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan persoalan rakyat begitu, Pak.

Nah, itu aja sedikit dari kami, Pak Menteri. Tapi sekali lagi kami mengapresiasi, semoga Pak Menteri bisa terus istiqomah dalam menginspirasi kami semua.

Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Terima kasih, Pak Mufti Anam. Ini hari yang baik Pak Menteri, biasanya Pak Mufti Anam kalau mujinya tinggi, nanti belakangnya ada sesuatu. Ini muji terus, Pak Menteri, luar biasa ini, vitaminnya cocok.

Bu Evita Nursanty, silakan.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ada tanda-tanda *kayaknya nih*, Pak, kalau saya lihat kalau begini.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Saya menyambung dulu apa yang disampaikan oleh Pak Mufti Anam tadi, Pak. Mengenai *e-commerce* ini, memang kita dilema, ya, jadi di satu sisi kita ingin konsumen kita itu mendapatkan barang yang baik dengan harga yang bersaing, tapi disisi lain, kita juga menginginkan jangan sampai produk impor ini merajalela di *e-commerce* ini, Pak. Jadi memang harus di, diambil langkah-langkah yang memang ya kita *enggak* bisa, benar kata Pak Mufti tadi, saya baca *nih*, jangankan ini, isu Tiktok saja lah, ingin memiliki *platform*-nya sendiri. Itu di media sudah ada pro dan kontra di dalam hal ini, *gitu*. Tapi kalau mengenai “Project S” dari Tiktok ini Pak saya tidak sepakat, Pak, bahwa dia akan memiliki, akan menjual sendiri produksi mereka, saya tidak sepakat. Karena bukan hanya hal Tiktok ini saja, Pak, itu yang namanya biasanya kita sebut apa namanya, yang kalau penjual-penjual di Medan *tuh*? Inang-inang itu ya, penjual-penjual di, mereka mengatakan, dengan *e-commerce* saja, mereka itu sudah pendapatan mereka itu turun, karena kan mereka jual langsung di *e-commerce*, harga mereka itu di, di atas daripada apa yang dijual di *e-commerce*. *Nah*, ini juga kita mesti, apa namanya, memikirkan bagaimana nasib pedagang-pedagang konvensional yang tidak *e-commerce* ini, Pak. Karena dia *ngambil* dari dari misalnya dari apa lah, langsung dari apa, Thamrin City, *gitu*, Pak. Mereka juga yang dari Medan ini *ngambilnya* dari Thamrin City, karena dia jualan *online*, *cost*-nya *enggak* ada, apanya *enggak* ada, Pak Menteri, mereka yang itu yang ribut-ribut, kalau ini kan dijual segini, dijual segini, harganya, itu mereka *enggak* bisa bersaing, Pak Menteri. Pedagang-pedagang, inang-inang kita ini, Pak, yang di sana. *Nah*, ini juga saya rasa perlu untuk mendapat perhatian daripada Pak Menteri.

Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Menteri, karena saya hanya baca di media saja, itu mengenai rencana dari Pak Menteri itu merevisi Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Pak. Ini sebenarnya tentu ini mengenai ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam tentunya berkaitan lagi dengan *e-commerce* ini. Ada wacana pokoknya yang di bawah 100 dolar, *enggak* boleh dijual, ada yang ini, ada yang ini, sekarang kan masih di dalam wacana-wacana, Pak Menteri. Sebenarnya mungkin bisa dicari, Pak, ya. Saya juga bertanya, *kenapa* yang hanya di bawah 100 dolar, *gitu loh*, *kenapa* tidak 50 dolar. Hal-hal setiap keputusan itu kan pasti ada kajiannya, *kan gitu*, Pak Menteri. *Nah*, ini mungkin bisa dibikin *clear*, sebenarnya apa *sih* rencana Pak Menteri mengatasi ini? Kalau memang produk-produk itu sudah bisa diproduksi oleh UMKM, saya sepakat, *enggak* boleh produk impor, *gitu*, Pak, kalau bisa diproduksi oleh kita. Tetapi jangan lupa kita juga sudah menandatangani perjanjian *trading electronic* apa, *transaction*, dengan ASEAN. *Nah*, saya berharap jangan sampai rencana Pak Menteri merevisi peraturan perdagangan ini, melanggar dari kesepakatan-kesepakatan internasional yang sudah, apa namanya, kita lakukan bersama negara-negara lain.

Kemudian, Pak Menteri, saya mengapresiasi langkah-langkah dari Pak Menteri ya, Kementerian Perdagangan. Ya kita miris juga ya, bagaimana kita saat ini menghadapi, kita kalah dalam di WTO ya, Pak, ya? Diskriminasi yang dilakukan oleh EU *nih*, Pak, terhadap minyak nabati kita, kan begitu, Pak. Saya masih ingat, saya dengan Pak, saya diminta Pak Faisol mendampingi beliau pada waktu itu bertemu dengan delegasi dari EU, isu ini kita angkat, Pak, pada saat itu, ya kan. Tapi mereka sepertinya di parlemen sendiri, *enggak* punya suatu kekuatan, ya, Pak, ya. Saya bilang bahwa sebenarnya kita harus, mereka ini kan mengatakan, keputusan mereka ini berdasarkan riset, kan begitu, Pak, ya kita juga harus balas dengan riset, kan begitu, Pak. Keputusan mereka berdasarkan data, kita juga harus jawab berdasarkan data, Pak Menteri. Dan ini memang harus benar-benar dilakukan *total diplomacy*. Ini yang kena kan Malaysia, yang kena juga Thailand, ya kita *siner* terpadukan, Pak, apa namanya, kekuatan kita dengan Malaysia dan Thailand ini, untuk menghadapi mereka, Pak. Jadi saya sarankan diplomasi total itu harus dilakukan oleh Pak Menteri, dengan negara-negara yang terdampak, Pak Menteri.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bu Evita.

Selanjutnya Ibu STDT (Sondang Tiar Debora Tampubolon).

F- PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Terima kasih, Pak Sarmuji.

Saya *udah* lama *enggak* dengar singkatan STDT, dulu 2019 saya STDT, sekarang Sondang Tampubolon saja, Pak, cukup, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI dan rekan-rekan Anggota Komisi VI, Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Wakil Menteri Perdagangan yang luar biasa, Pak Jerry, Beserta seluruh jajaran Kementerian Perdagangan,

Terima kasih atas hal yang disampaikan, pertama, karena agendanya yang pertama adalah anggaran, saya sedikit saja tentang anggaran ini. Cuma agak sedikit prihatin, karena pagu 2023 dengan 2024 turun ya, Pak? Turunnya lumayan banyak, 500. *Nah*, ini perlu mendapat apa ya, perhatian khusus begitu, *kenapa* bisa turun, apakah karena penyerapannya 2023 tidak maksimal? Atau evaluasi anggaran 2022-nya juga tidak maksimal? Atau ada karena hal lain? Apa karena yang dianggarkan dari Kementerian Keuangan segitu? Atau karena pendapatan negaranya tidak tercapai? *Nah*, itu kan harus ada dievaluasi, karena dalam menghadapi 2024, saya pikir harusnya anggarannya tidak boleh turun ya, karena ada banyak hal yang harusnya dikerjakan dan di optimalisasi, seperti misalnya ini kan kalau dari catatan Pak Menteri, dukungan manajemen *aja* turun ya, hanya berapa puluh miliar. *Nah*, ini tolong nanti disampaikan apa dan apa, apa upaya dari Kementerian Perdagangan dan dukungan apa yang diperlukan dari Komisi VI, supaya ini jangan turun, kalau bisa bertambah, supaya bisa peningkatan. *Nah*, walaupun nanti sebetulnya kita akan membahas lagi mengenai anggaran ini di konsinyering, *cuman* saya *pengen* minta untuk nanti dipaparkan lebih, ya walaupun kita kan tidak membahas sampai apa satuan tiga begitu, ya tapi setidaknya di, *dibikin* belanja barangnya berapa, belanja modalnya berapa, baru masuk kepada unit-unit eselon begitu, Pak.

Kemudian yang kedua, agendanya adalah tentang perjanjian perdagangan. Walaupun tadi sudah diketok, itu sudah melewati yang namanya perpres saja, tapi saya mau sedikit membahas mengenai perjanjian perdagangan ini. Juli kemarin saya ke ITPC, eh ke Chile, Pak, jadi saya sebetulnya mampir juga ke ITPC di Chile. Luar biasa, ITPC Chile ini salah satu yang cukup baik, dia lokasinya cukup strategis di Chile, dan *ketemu* dengan Kepala ITPC di sana, kami disambut dengan baik dan kita tanya hal-hal yang apa yang perlu mendapat dukungan, yang salah satunya memang ini, adalah ratifikasi, supaya untuk menguatkan. Tapi untuk mengenai, bicara mengenai perjanjian perdagangan, saya harap bahwa perjanjian

perdagangan yang sudah banyak kita tanda tangani dan kita setuju, bahkan kita ratifikasi melalui undang-undang, ini bisa membawa manfaat yang cukup baik untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kalau tadi teman-teman dari, dari dua-duanya dari PDI-Perjuangan, yang pembicara sebelum saya, melihat bahwa sepertinya banyak juga efek yang kurang baik mengenai adanya perjanjian perdagangan ini, salah satunya adalah bagaimana banyaknya pasar barang-barang yang masuk ke Indonesia, yang begitu bebasnya, sehingga produk-produk di dalam negeri seolah-olah dalam tanda kutip, dia tidak dapat terlindungi. *Nah*, ini sangat berbahaya sekali. Karena sebenarnya *kan* kita kalau mau melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain, kita ingin mendapatkan akses pasar yang lebih luas ke luar negeri, bukan kita yang menjadi pasar mereka. Walaupun memang sama-sama harus *win-win solution*, sama-sama menguntungkan. Tapi harapan kita adalah kita bisa mendapatkan akses pasar yang jauh lebih besar di negara sana. Bukan barang-barang kita, produk-produk dalam negeri kita yang terkuras habis dan tidak bisa berdaya saing. *Nah*, ini harus mendapat perhatian khusus begitu.

Bagaimana nanti apa namanya, langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan untuk bisa melindungi ini. Apakah ada evaluasi, Pak, terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dilaksanakan selama ini? Terutama, saya menggarisbawahi, Indonesia-China CEPA mungkin. Karena ternyata barang-barang dari sana itu ternyata banyak sekali, mungkin sepatu kita, pakaian kita, kaca mata, semuanya, *kayaknya enggak* ada lagi yang *enggak* dari sana. Kita bukan anti dengan barang dari luar negeri, tapi kita *pengen* bagaimana produk kita dalam negeri ini jangan kalah sainglah, begitu, sehingga akhirnya ya karena harga di sana lebih murah, kualitasnya juga oke, akhirnya barang sana dibawa sini, dicap aja *made in* Indonesia, akhirnya nanti jadinya de-industrialisasi, bukan menjadi menggiatkan industri, tapi malah pada tutup industri kita dalam negeri ini, baik dia skala kecil, menengah, maupun yang besar.

Kemudian bagaimana dari perjanjian perdagangan ini, tentu saja kita ingin ada peningkatan investasi. *Nah*, dengan adanya IC CEPA ini bagaimana? Apakah ada investasi yang sudah prospektus masuk ke dalam Indonesia, *gitu*, dan lain-lain sebagainya? Saya pikir cukup baik ya, yang, yang lain-lain. Dan juga tentu saja untuk perlindungan daripada para pengusaha petani kita, itu harus diperhatikan.

Nah, terus kemudian tadi di sini juga dilihat ada indikator-indikator kinerja dari Kementerian Perdagangan, salah satunya adalah inflasi pangan. Ini mohon menjadi perhatian sekali dari Kementerian Perdagangan, karena sudah mulai *kerasa* di apa namanya, di lapangan, bahwa sedikit demi sedikit itu ter, apa namanya, inflasi itu ada, *enggak* mungkin *enggak* ada, Pak. Karena saya secara khusus untuk harga beras ya, ketika kita *pengen* mau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat itu agak susah untuk mendapatkan harga beras yang memang disampaikan oleh pemerintah bahwa masih stabil. Tolong dijaga sekali inflasi, karena begitu satu, naiknya nol koma sekian persen saja, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf kalau ada salah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Makasih, Bu Sondang.

Selanjutnya, kali ini *enggak* akan saya singkat namanya, karena sudah singkat. Pak Khilmi.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen, beserta jajarannya,

Jadi saya ini mengamati, Pak, ya, selama delapan tahun di Komisi VI, sinergi antar kementerian ini *kayaknya* tidak jalan. Kebijakan antar kementerian yang satu dengan yang lain kadang-kadang tidak sejalan, makanya banyak dirjen yang ditangkap ke kejaksaan, karena kebijakan antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain itu beda-beda, jadi sebetulnya saya ini kasihan, *gitu loh*.

Sebetulnya kalau kita ini mengamati ya, di Kementerian Perdagangan ini *kan* disuruh *nggenjot* ekspor, ekspor, tapi dalam hal melakukan kebijakan ini *kan* harus sinergi antar kementerian yang membuat kebijakan, antara yang regulasi yang akan dikeluarkan. *Kenapa* industri kita ini di dalam negeri selalu kalah dengan negara-negara luar? Apalagi dengan perjanjian-perjanjian antara negara ASEAN, China, Chile. Kita ke depan ini tidak akan bisa menang, Pak, harga produk yang akan dijual di dalam negeri. Untung sumber daya manusia kita di Indonesia ini sangat banyak, sehingga pangsa pasar kita ini masih bisa terserap. Ini contoh kecil, Pak, ya industri perikanan kita, udang, misalnya. Saya pernah berkunjung ke Jepang sama teman-teman Komisi VI, di situ, Pak, *kenapa* udang kita ini kalah harganya dengan Pakistan, India? Karena harga makanan udang kita di Indonesia itu sangat mahal. Bahan baku yang akan didatangkan dari luar negeri, bahan baku masuknya *udah* 35% sendiri pajaknya, belum nanti dikelola di pabrik. Padahal itu *kan* kebutuhan makanan yang ada di dalam negeri, *gitu loh*, untuk makanan udang. Jadi harga makanannya itu bila dibanding dengan Pakistan, India itu, kalah kita, karena di sana apa? Bahan baku impor bahan baku makanannya itu *udah* 0%, jadi harga makanannya pasti murah. Jadi saya kalau *bikin* kebijakan-kebijakan kita ini bernegara, kita memutuskan satu kebijakan nanti ke depannya ini akan terjadi apa, itu harus dipikirkan semua, Pak. Jadi jangan sampai kita bikin kebijakan tapi nanti tiga bulan ada masalah, baru kita merevisi kebijakan itu.

Ini saya ambil contoh Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jadi sumber daya alam itu *kan* harus dipilah-pilah *kan*, mana sumber daya alam yang cuma tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, itu devisanya harus *kayak* apa? Ini dari Perpres ini, Pak, keseluruhan sumber daya alam itu disamakan. Jadi ekspor 250 ribu dolar, uangnya harus disimpan ke cadangan devisa, DHE, 30%. Iya kalau orang itu permodalannya itu besar, kalau orang modalnya cuma 20 M, terus melakukan ekspor sebulan empat kali, uangnya di, harus ditahan tiga bulan, 120%, ya mati. Padahal di situ banyak yang dilakukan, industri itu mengandung sumber daya manusia yang besar, *gitu loh*, seperti industri perikanan. Jadi kita ini

harus memilah-milah, kan kalau membuat perpres itu jangan dipukul rata. Saya kemarin sampai heran, kita ini mau melakukan ekspor, kalau uang saya ini cuma 20 M, terus uang saya ditahan 120% selama sebulan, selama tiga bulan, walaupun, kata Bu, aku sampai kemarin waktu pembahasan anggaran RAPBN sama Bu Sri Mulyani keluar, saya cegat, saya ajak *ngomong* "Loh kebijakan ini gimana, Bu?" terus dia *ngomong* "Kita lihat tiga bulan". Lah kalau kita melihat tiga bulan, perusahaan itu mati, bagaimana caranya untuk memperbaiki lagi? Jadi kita ini kalau membuat kebijakan, dalam hal kebijakan negara itu harus dilihat, implementasi ke depannya itu kayak apa, *gitu loh*. Masalahnya ini kan berhubungan dengan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin-izin ekspor-impor. Nanti kalau eksponya rendah, nanti dipikir Kementerian Perdagangan ini tidak berprestasi. Jadi saya harapkan ini, kebijakan-kebijakan kayak begini ini, sebelum memutuskan, sebelum membuat permen, perpres itu juga harus dilihat apa *impact* ke belakangnya itu.

Terus masalah beras, Pak Menteri. Jadi Kementerian Pertanian itu dalam melakukan survei masalah beras, di bidang pertanian itu ada tiga yang dipakai. Saya juga sampai bingung, dari BPS, dari pemprov, habis *gitu* dari surveinya dia sendiri. *Lah* kalau yang dipakai itu hasil surveinya sendiri, padahal cadangan beras nasional itu *udah* 500 ribu, ini kan ada yang salah *gitu loh*. Harga beras mahal nanti Menteri Perdagangan lagi yang disalahkan, seolah-olah tidak bisa melaksanakan distribusi yang baik, padahal kita ini tiap sosialisasi dari Kementerian Perdagangan itu, yang disosialisasikan itu, pengawasan bahan pokok dalam negeri. Kita melaksanakan 4 kali sosialisasi, ya yang di sosialisasikan itu bagaimana masyarakat ini mengawasi harga bahan pokok ini jangan sampai melonjak, *kan gitu*, Pak Menteri.

Jadi harapan saya, dalam rapat antar kementerian ini, kayak begini-begini ini disampaikanlah, supaya industri-industri dalam negeri kita ini tidak mati. Jadi kayak industri makanan dan minuman, dan apa itu, bumbu masak, tidak akan bisa lawan Vietnam. Bahan baku dia masuk, *udah* mahal. Kalau kita beli bahan baku dalam negeri, harganya mengikuti harga internasional.

Jadi itu dari saya, tambahan masukan-masukan, mudah-mudahan ke depan kita dalam menjalankan mudah-mudahan Indonesia Maju menang, kita bisa menjalankan pemerintahan yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pesan terakhir ini dahsyat, intinya doa tadi itu.
Baik, jangan diperpanjang, silakan, Pak Harris Turino.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Zulhas, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya,

Walaupun beda koalisi, tetapi saya harus mengapresiasi, Pak, 39 bulan berturut-turut ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Sejak Mei 2020, kita selalu surplus di sisi perdagangan, tetapi kita tahu bahwa surplusnya semakin mengecil. Saya ambil satu data untuk bulan Juni, surplusnya tinggal 3,45 miliar, ya, dan bulan Juli lebih kecil lagi, 1,31 miliar. Data Agustus belum keluar atau paling tidak saya belum dapat. *Nah*, yang agak miris adalah ekspornya turun dan penurunannya cukup besar, Pak Menteri. Contoh di bulan Juni, ekspor kita hanya 20,61 miliar, ini turun 5,68% dibandingkan Mei dan turun 21,18% *year on year* dibandingkan Juni tahun lalu, dan di bulan Juli, ekspor kita bahkan turun juga lagi 18,03% dibandingkan dengan tahun yang lalu. *Lah* kira-kira apa mitigasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Karena kalau sudah 38 eh 39, harusnya bisa ke 40, 41, dan seterusnya, paling tidak sampai diselesainya pemerintahan ini, supaya tetap dijaga surplusnya. Padahal kita tahu, terjadi tren penurunan harga komoditas dunia dan perlambatan ekonomi di banyak negara.

Ada hal yang menarik, Pak Menteri, kelihatannya peranan ITPC, Pak, ini terutama di negara-negara *non-traditional market*, ini perlu ditingkatkan. Saya melihat Pak Sekjen luar biasa, ketika *merubah* suasana ITPC di Mexico City dari tadinya hanya kantor yang orang enggan datang, sekarang kopinya enak di sana, wujudnya adalah *cafe*, orang bisa datang, enak, sehingga tidak ada keengganan. Mungkin kalau masuk ke KBRI, orang enggan, tetapi kalau *cafe* bisa *ngobrol*, karena ini adalah mempromosikan Indonesia, ya.

Yang juga menarik adalah ketika saya mengunjungi ITPC di Los Angeles, di LA, ITPC-nya memang *nempel* ke konjen, tapi ruangnya sangat besar dan orang-orangnya sangat pro aktif, Pak. Aktif berkunjung ke mana-mana, aktif mempromosikan produk-produk Indonesia. Sampelnya tersedia dan saya melihat kompetensi orangnya juga luar biasa, tetapi anggarannya tidak cukup. Bahkan beberapa orang ITPC untuk tinggal, *nombok*, Pak, sehingga ini mungkin perlu dibicarakan, anggaran ITPC menurut saya, kita sepakat untuk ditingkatkan, Pak, ya. Nanti bisa dibicarakan, bila perlu dengan KBRI atau saya *endak* tahu, dengan Kementerian Keuangan, karena ini untuk menyelamatkan *sustainability* dari surplus kita ke depannya dan kita perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa nanti sampai ke level kinerja, tetapi, Pak, tidak semata-mata anggaran ITPC ditingkatkan, targetnya juga ditingkatkan, jadi benar-benar *target base*. Ke depannya ini akan menyelamatkan, menurut saya.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bursa crypto. Kan sudah ditandatangani Pak Didit, 17 Juli, untuk bursa crypto, *commodity future exchange* dan 28 Juli sudah mulai diresmikan oleh Pak Menteri. Sejauh mana perkembangannya, Pak? Ini bursa baru, jangan sampai di bursa yang baru, banyak lembaga yang tidak berfungsi secara maksimal terutama paling tidak, dari sisi kliring dan dari sisi penyimpanan aset crypto. Karena kalau ini terjadi penyimpangan di situ dan muncul ledakan, ini dampaknya cukup berbahaya, karena nilai yang terlibat sangat besar dan di bursa ini melulu adalah mengenai kepercayaan. Kalau reputasinya runtuh, susah sekali untuk membangun kembali. Jadi kepada Kepala Bappebti, ini *tulung dijagain*, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kepercayaan.

Dan yang ketiga, yang terakhir, Pak, mengenai Badan Perlindungan Konsumen, ya ini BPKN ini kan sudah berakhir masa jabatannya dan Pak Sekjen sudah mengeluarkan surat tanggal 24 Agustus, masa tugasnya berakhir. *Nah*, tetapi yang baru belum, bukannya dilantik, diseleksi di kita saja belum Pak? Sampai sekarang belum ada surat yang masuk ke Komisi VI mengenai ini, sementara lembaganya sudah tidak berfungsi. Dan berdasarkan surat dari Pak Sekjen tadi yang Nomor KP03/04, Pak Sekjen mengatakan, bahwa pelayanan kepada masyarakat terkait Perlinkos ditampung di Sekretariat BPKN, BPKN RI. Hanya kalau ada hal-

hal yang *urgent* koordinasi, baru diserahkan kepada Dirjen Perlinkos dan Tertib Niaga. Berarti pelayanan kepada masyarakat dikorbankan, menurut saya, karena apakah benar Dirjen Perlinkos dan Tertib Niaga punya kewenangan yang sama dengan Badan Perlindungan Konsumen nasional? Tentu tidak. Sehingga kalau memang ini sudah berakhir dan kemudian pejabat-pejabat BPKN sudah menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden per 31 Agustus, mohon segera usulan penggantinya diajukan, supaya masyarakat tidak dirugikan, intinya semata-mata adalah masyarakat tidak dirugikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Harris.

Pak Menteri, yang disampaikan Pak Harris tadi dari logatnya saja *udah* kelihatan serius, Pak Menteri. Pak Harris *tuh* kalau masih biasa, katanya “tolong”, tapi kalau sudah serius, “*tulung*”.

Silakan, selanjutnya Pak Darmadi.

F- PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan jajarannya,
Pak Zulhas dari koalisi Indonesia Maju,

Ini gara-gara Bapak Koalisi Indonesia Maju, Pak, spanduk kita harus banyak ganti *nih*, Pak, karena spanduk kita gerak cepat, Indonesia Maju harus ganti semua, Pak. Ini beberapa poin, Pak. Yang pertama, apresiasi, Pak, program-program bagus, Pak, sosialisasi bagus, Pak, lancar semua ya.

Yang kedua, ada keluhan, Pak Menteri, dari pelaku usaha, sistem di INSW sering *down* Pak sekarang, Pak. Walaupun itu di walaupun itu adanya di Kementerian Keuangan tapi itu kan nyambung nya ke Ina Trade, Pak, kan macet juga nanti, Pak. Pengaruh ke PI-nya juga, Pak, mungkin bisa dibantu koordinasi dengan Kementerian Keuangan, karena dia *nyambung*, Pak, jadi itu banyak keluhan, *nah*, ini beberapa catatan dari mereka.

Tadi juga soal revisi Permendag sudah banyak ditanyakan soal Permendag 50/2020. Saya *enggak* bahas lagi, karena sudah banyak, mungkin nanti agak dijelaskan intinya apa *sih* nanti keputusannya seperti apa, Pak Menteri, karena soal impor tadi, apakah jadi, seperti yang dijelaskan, tahapnya sampai di mana, ya.

Kemudian lambannya PI, Pak, Persetujuan Impor, kalau Pak Budi, Pak Dirjennya *sih* cepat, Pak, kalau di WA cepat menjawab. Tapi di PI banyak juga keluhan, Pak, ada yang daftarnya dari 18 Agustus sampai sekarang *enggak* kelar-kelar juga, *nah*, ini mohon apakah memang perlu begitu lama untuk persetujuan PI di beberapa industri, *gitu*.

Kemudian soal realisasi impor bawang putih, Pak, *udah* bagus, Pak, *udah* banyak yang keluar, harga, tapi saya dengar masih lumayan tinggi. *Nah*, mohon dimonitor, realisasinya bagaimana, Pak? Apakah realisasinya masih rendah yang impor ini? Sehingga barang di pasar tidak terlalu banyak, akibatnya bisa saja harga *enggak* turun-turun, Pak, Pak Menteri. Mungkin dimonitor juga, yang dikasih ini pelaku atau bukan. Kalau bukan pelaku *kan nyari-nyari* dulu, Pak Menteri, ya ini mohon diverifikasi kembali, itu soal importir barang putih.

Soal anggaran ITPC, saya setuju, Pak, mohon dicek kembali. Kami sama dengan Bu Sondang, baru dari Chile, Santiago, bagus Pak, SDM-nya bagus, kantornya bagus, ya. Lupa saya namanya, Pak, bunda siapa itu ya? Indah, Indah itu bagus, Pak, layak dipromosi ya. Dilayani dengan bagus, kantornya bagus, ditraktir makan di ruangan juga bagus, Pak, *dimasakin* Indomie bagus, dengan Bu Intan Pak saya ke sana, Pak, ya Bu Intan, Mahal Indomie. Tapi memang keluhannya, Pak Menteri, ini soal logistik, Pak. Memang, biaya logistiknya mahal sampai sana. Ini daya saing terpengaruh *enggak gitu*? Karena jauh *kan*, Pak Menteri *enggak* tahu, *udah* pernah belum ke sana? Kalau perjalanan *tuh* tiga kali ya, 30 jam ya, Pak, ya? Jadi *capek*, cukup *capek*, karena dia harus pindah-pindah, tapi soal anggaran mungkin keluhan. Tapi bagaimana dilema soal logistik *nih*, karena ada kerja sama ini Indonesia-Chile ini. Logistik yang begitu jauh dan daya saingnya juga berkurang, Pak, nanti, jadi ini juga salah satu poin.

Kemudian soal barang-barang impor, itu bagaimana di Permendag 50 nanti soal barang diimpor, kemudian di *repacker*, jadi seolah-olah barang dalam negeri ini kemudian dijual, ini solusinya bagaimana? Tadi *kan* kalau di peraturannya hanya untuk yang *crossborder aja kan*? *Nah*, ini penjelasannya seperti apa, karena di pasar juga simpang siur ini, Pak Menteri.

Jadi itu beberapa poin yang saya sampaikan langsung saja poin-poin itu, nanti mohon bisa dijawab. Saya pikir itu, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya dari sebelah kanan, yang terhormat, Pak Nusron Wahid,

F- PG (NUSRON WAHID):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri, Pak Sarmuji yang kami hormati,
Bapak-Bapak sekalian,

Yang pertama, soal anggaran, kami, pertama yang diusulkan ini langsung kita setuju saja, *endak* usah ada rapat pembahasan lebih lanjut. Pertama, anggarannya sudah dikurangi, pembahasan lebih lanjut, yang mau dilanjutkan apa? Kecuali kalau ada jaminan dari Pak Sarmuji, kalau ada pembahasan lanjut, anggaran yang 500 miliar dikembalikan. Kalau *enggak* dikembalikan, untuk apa rapat dilanjutkan? Bikin *capek-capek* saja, ini masa-masanya lagi masa-masa kampanye, jangan terlalu banyak rapat terlalu sering kita.

Yang kedua, poin kedua, saya sudah WA Pak Menteri, tapi sebagai pertanggungjawaban politik, akan saya sampaikan di forum ini, soal masalah apa namanya itu, verifikasi impor yang sedang akan ditambahi satu barang yang bakal diverifikasi yaitu limbah B3, limbah B3 sama tekstil, TPT. Kami melihat beberapa pengalaman yang dulu-dulu, terutama ekspor, apa, impor TPT, itu kita menjadi tempat transit, *transshipment*. Dulu pada lima tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, yang namanya Tanjung Priok itu, yang namanya Batam itu, salah satu tempat yang empuk untuk masuknya barang dari China, transit di Priok, kemudian dikirim lagi seakan-akan itu adalah ekspor dari Indonesia, padahal hanya *transshipment*. Nah, karena itu kami mohon pertanggungjawaban daripada tim verifikasinya. Nah, tim verifikasi impor ini dulunya tunggal, yaitu adalah negara, yaitu konsorsium antara Sucofindo sama Surveyor Indonesia. Tapi kali ini, verifikasi impornya itu terlalu banyak dominasi swasta, ya, Anindya ya kan, Anindya dan sebagainya. Bahkan ini saya mendengar informasi yang limbah B3 ini pun impornya itu juga yang akan ditunjuk adalah Anindya.

Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya mohonkan di sini tentang yang namanya impor tekstil TPT, sama limbah ini adalah krusial, karena kita pernah mengalami Indonesia ini sebagai tempat *transshipment*. Supaya kita rigit, soal itu kami mohon kalau bisa verifikasinya itu dikembalikan, khusus dua komoditi ini kepada konsorsium BUMN, supaya ekornya bisa kita pegang, yaitu adalah konsorsium SI sama konsorsium Sucofindo yang sekarang sudah menjadi holding di bawah BKI. Daripada kita serahkan sama swasta, nanti kalau ada apa-apa, dia tidak *prudent* kerjanya dan kalau ada apa-apa, ujung-ujungnya, Dirjen Perdagangan *prudent* Luar Negeri dan Direktur Impor yang disalahkan. Dan ujung-ujungnya, akan mengganggu kinerja daripada Bapak Menteri Perdagangan.

Yang saya nilai, Pak Menteri Perdagangan ini sejak dilantik sampai sekarang, sudah mulai mapan. Begitu Bu Intan, sudah mapan sesuai dengan lagunya PAN, PAN, dan makin mapan. PAN-PAN, *kan* makin mapan dan makin terdepan, *nah*, sudah terdepan untuk soal perdagangannya ini. Nah, karena itu sekali lagi, hanya dua poin ini, Pak, saya minta *ingetin* kalau bisa untuk verifikasi barang impor terutama yang TPT sama yang limbah B3 itu dikembalikan sama BUMN saja. Bukan berarti saya anti swasta, tidak. Tapi faktanya, swasta *udah* banyak kesempatan dan banyak disalahgunakan. Kita lihat bagaimana verifikasi di nikel, pernah dipersoalkan Pak Andre di sini, jadi masalah, sehingga apa pun yang terjadi, pasti kita ingin mendorong BUMN Surveyor kita supaya lebih maju.

Saya kira itu Pak Budi, ini kawan lama saya ketika *ngurus* TKI di Taiwan ini Pak Budi, sekarang menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Pak Isy Karim penampilan *udah* makin mantap sekarang, Pak Isy Karim. Kalau dulu, sudah penampilan Dirjen betul, sudah mulai meningkat dari, Pak, *anu*, dari penampilan camat, sudah mulai penampilan dirjen betul sekarang ini, sudah makin mantap ini Pak Isy Karim.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Nusron.

Selanjutnya dari sebelah kiri lagi, Ibu Melani.

F- PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajarannya,

Sebelumnya sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Menteri, di doakan panjang umur, sehat, dan tambah sukses, Aamiin.

Mungkin tadi teman-teman juga sudah menanyakan tentang adanya, kalau di DKI tercatat adanya kenaikan beras, tapi tadi teman-teman juga sudah menanyakan, tapi saya harus menyampaikan juga, karena apa yang menjadi penyebab tren kenaikan ini biar walaupun menaikinya tidak banyak, tetapi mungkin Menteri Perdagangan akan lebih juga bisa terus menjaga stabilitas harga khususnya beras, karena yang dari teman-teman dari di DKI yang menanyakan tentang ini, yang saya harus sampaikan.

Kemudian juga strategi Kementerian Perdagangan untuk terus memperluas pasar ekspor. Yang saya ketahui, Pak Menteri akan menggarap pasar ekspor potensial di negara-negara, di negara-negara nontradisional, yang kita ketahui bahwa 20 Agustus, pemerintah telah mengadakan kunjungan ke Benua Afrika yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, di Afrika Selatan. Bagaimana sejauh hasil yang didapat dari kunjungan Benua Afrika tersebut, khususnya bagi perluasan pasar ekspor, sebagaimana ditargetkan Kementerian Perdagangan di negara pasar nontradisional? Apa ke depannya terdapat lagi rencana pendirian ITPC, khususnya di Benua Afrika? Bagaimana pula Pak Menteri menjalankan strategi yang dalam, agar lebih mengoptimalkan peran para diaspora Indonesia di benua tersebut?

Kalau kemudian, kalau tentang persetujuan kemitraan *economic comprehensive* antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chile mungkin tidak usah dibahas lagi, karena dengan perjanjian itu sekarang saja sudah menghasilkan surplus sebesar USD14,8 juta, sehingga mungkin itu akan lebih ditingkatkan lagi dengan adanya perjanjian ini.

Kemudian kebetulan saya baru-baru ini berkunjung ke Malaysia dan ketemu dengan Dubes Malaysia, mengatakan bahwa akan di Kuala Lumpur dibuat seperti *House of* Indonesia, ada lahan yang bagus yang besar, yang di sana akan dibuat seperti, untuk semua produk-produk Indonesia. Apakah ini sudah ada kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan Kedutaan Malaysia di Indone, Kedutaan Indonesia di Malaysia? Karena mungkin itu potensinya bagus sekali, karena kita bisa menjual berbagai macam produk di lahan yang katanya akan cukup besar untuk menjual semua produk-produk Indonesia dari makanan dan lain-lainnya.

Dan saya mau menanyakan, ITPC Indonesia di Malaysia seperti apa, aktif atau tidak? Karena sekarang itu kalau di Malaysia, katanya dubesnya, yang paling banyak itu apa, mengundang artis-artis dari Indonesia. Jadi setiap minggu ada pertunjukan-pertunjukan dan itu selalu dipenuhi, banyak, ya. Jadi apakah dengan adanya apa namanya, trennya artis-artis Indonesia yang banyak apa, di manggung di Kuala Lumpur, itu bisa juga kita mempromosikan barang-barang produk-produk Indonesia untuk lebih bisa kita berkembang, dengan adanya tadi *House of* Indonesia terus banyaknya acara-acara setiap minggu ada artis-artis Indonesia yang manggung di Kuala Lumpur.

Mungkin itu, sementara itu.
Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Bu Melani.

Selanjutnya dari sebelah kanan, Ibu Mulan Jameela.

F- P. GERINDRA (MULAN JAMEELA):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,
Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang saya sayangi,
Bapak Menteri Perdagangan beserta jajarannya,

Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun, Pak, maaf terlambat mengucapkannya, semoga semakin menginspirasi kami-kami, sehat selalu panjang umur, *barakallah fii umrik Aamiin, Aamiin ya robbal alamin* dan semangat untuk kita ya, Pak, ya. Oke.

Iya baiklah, yang pertama saya ingin mengapresiasi dengan adanya hubungan bilateral perdagangan antar Indonesia-Chile. Dan saya, kita berharap mudah-mudahan kerja sama berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, yang pertama ingin saya tanya, produk-produk apa saja *sih* yang di apa ya, yang Chile butuhkan dari Indonesia? Karena tadi saya lihat dan baca juga belum ada disebutkan produk-produknya apa.

Dan yang selanjutnya, karena Indonesia ini memiliki UMKM yang cukup besar dan tinggi, apakah Kementerian Perdagangan juga berniat melakukan, menjual hasil UMKM ke sana? Dan yang selanjutnya, agar produk UMKM kita juga berdaya saing tinggi dan juga bisa diekspor ke negara Amerika Latin dalam hal ini memang Chile yang masih, yang bekerja sama, apakah Kementerian Perdagangan sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan hasil UMKM di Indonesia ini? Dan apakah Kementerian Perdagangan juga berniat untuk memperluas CEPA di negara Amerika Latin lainnya?

Kemudian yang selanjutnya, saya melihat paparan dari Bapak di halaman ke 11 dan ke 12, ini yang berkaitan dengan apa pasar ya, Pak, ya, pasar rakyat. Saya ingin menyampaikan, ada beberapa aspirasi dari dapil saya, yaitu Garut dan Tasik, Tasikmalaya. Begitu banyak pasar yang masih belum layak atau tidak layak, seperti yang tadi juga dipaparkan di halaman 11, di mana pasar rakyat tidak layak ini jauh lebih banyak daripada pasar yang tidak layak. Dan saya berharap apa, karena memang kita memiliki aspirasi pasar-

pasar yang tidak layak, begitu banyak juga dari dapil kami, saya berharap juga apa ya, pasar-pasar yang tidak layak ini mendapat, bisa mendapatkan revitalisasi agar pasarnya bisa lebih layak lagi.

Itu saja mungkin, Pak, yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Terima kasih, Bu Mulan.

Selanjutnya, Pak Ananta.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Terima kasih Pak Sarmuji, Pak Martin Pimpinan Komisi VI, Kawan-kawan Komisi VI yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya,

Saya juga perlu mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan dan itu tidak hanya dari segi saya saja, tetapi kalau kita lihat masyarakat khususnya masyarakat Banten, juga memberikan apresiasi dan memberikan penilaian baik. Tetapi, Pak Menteri, kalau kemudian ada hal-hal yang sifatnya kecil pun, Pak Menteri berkenan menyelesaikannya, itu akan lebih sempurna, tidak hanya sekedar memberikan apresiasi. *Nah*, sehingga saya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis dan sangat sederhana saja.

Yang pertanyaan pertama, Pak Menteri, tadi disampaikan persoalan realisasi anggaran yang 55% itu. *Kan* Pak Menteri juga pernah menyampaikan tentang sasaran strategisnya. *Nah*, sehingga pertanyaannya sangat sederhana, dengan 55% realisasi anggaran itu sudah menjadi apa? Artinya, berapa persen sasaran yang telah tercapai? Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kita selalu bicara tentang kerja sama internasional dan kaitan dengan ini, Komisi VI juga pernah ikut meratifikasi tentang hal itu dan selalu di dalam diskusinya disampaikan agar kepentingan rakyat itu diutamakan. Sehingga saya mohon info, Pak Menteri, dari kerja sama-kerja sama seperti itu hasil, hasilnya *kayak* apa? Jadi yang surplus, yang negatif, yang untung, yang buntung misalnya, ini saya ingin mendapatkan informasi-informasi itu, sehingga pengambilan keputusan itu betul-betul sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau mengambil keputusan itu.

Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, ini juga ada keluhan yang tadi saya sampaikan, persoalan-persoalan kecil di masyarakat Karangantu itu di Serang. Memang ada keberadaan dari *anu*, apa, penggilingan PT Wilmar itu, itu sekarang ini kemudian banyak penggilingan-penggilingan UMKM itu tutup karena kalah bersainglah, kalah bersaing. *Lah* kalau tutup juga akhirnya meskipun penggilingan itu ada karyawannya 10, kadang-kadang ada yang lebih banyak, 20, tapi itu banyak, sehingga sekarang karyawannya itu kehilangan pekerjaan. *Nah*,

memang ada petani yang diuntungkan karena mereka bisa membeli gabah yang lebih tinggi. *Nah*, jadi itu memang dari sisi itu petani diuntungkan. Tapi akhirnya, karena dia mengonsentrasikan sehingga akhirnya dia berperilaku sebagai monopoli. Karena demikian, juga akhirnya berdampak pada harga, ya kan. Jadi mestinya harganya 10 ribu menjadi 13 ribu. Sehingga saya berharap, Kementerian Perdagangan yang mencari solusi ini, *gitu*, mencarikan solusi ini, sehingga ya petani diuntungkan, masyarakat juga diuntungkan, penggilingan-penggilingan UMKM tidak tutup, memang ini mesti dicarikan solusi.

Dan tadi juga disampaikan, Pak Menteri, persoalan beras ini memang kadang-kadang ada gejolak. Dan pemakan beras ini di Republik ini kan kira-kira 230 jutaanlah kira-kira. *Lah* pertanyaannya sederhana, apakah tidak mungkin, Pak, Pak Menteri membuat regulasi tentang harga beras, *kan gitu*, sehingga jangan sampai tanah yang *gemah roh, anu, gemah ripah loh jinawi* ini akhirnya ada orang yang apa namanya, tidak bisa makan, misalnya.

Yang terakhir, Pak Menteri, ini dengan kasus kecil juga, persoalan Badui, ya kan. Badui itu beberapa bulan yang lalu sudah menyatakan akan memutus akses internet, karena internet-internet yang masuk ke Badui Dalam itu dinilai lebih tidak mendidik, kemudian bertentangan dengan adat. Tetapi, Pak, ada satu sisi, di sana itu UMKM-nya tumbuh, produk-produknya ada, ada tenun, ada madu, yang menjadi produk unggulan. *Nah*, sementara Badui itu saya pikir bukan satu daerah yang anti bantuan, sehingga saya berharap Kementerian Perdagangan itu hadir di tempat itu, di tempat Badui itu. Karena juga sebetulnya Kementerian Koperasi juga menyatakan demikian, tapi ketika saya tunggu di Badui, memang tidak masuk-masuk, *gitu*. Saya berharap meskipun itu kecil, tapi karena dulu *kan* ada semacam mitos, Pak, Pak Menteri, di sana itu, pada saat apa namanya, Max Havelaar menceritakan *kan*, apabila Banten itu sejahtera, nusantara ini sejahtera, Pak Menteri. Jadi saya berharap meskipun ini kasus kecil, kemudian ada kasus bahwa mau memutus internet, tapi kan kita ini *kan*, kalau di kita *kan* sangat ramah dengan teknologi, sehingga saya berharap kekuatan kita ini untuk membantu mereka. Jadi mereka menganggap bahwa itu nanti bertentangan dengan adat, tapi yang kita, tidak, tapi bisa membantu produk-produknya.

Terima kasih, Pak Pimpinan dan Pak Menteri.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Ananta.

Selanjutnya Ibu Rieke Diah Pitaloka.

F- PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan, Rahayu,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya,

Terima kasih untuk pemaparannya, Bapak, dan terima kasih untuk kerja kerasnya di jabatan yang tidak terlalu lama tapi kami merasakan beberapa pencapaian selama masa kepemimpinan Bapak, mudah-mudahan akan tercapai *key performance index* yang lebih baik lagi.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama mengenai anggaran yang diajukan. Saya sepakat dengan teman-teman lain, 2,4 triliun untuk seluruh persoalan perdagangan di Republik Indonesia, saya kira kami memberikan dukungan penuh, tentu dengan nanti hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik.

Yang kedua, ada beberapa persoalan mengenai urusan pangan, saya kira, terutama kebutuhan pokok terkait bahan pangan, yang sebetulnya terjadi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok dan ini tentu saja tadi disampaikan oleh beberapa teman sebelumnya, menyangkut juga persoalan data yang digunakan. Dalam forum ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita mungkin sudah memahami, bahwa Kementerian Perdagangan, pertama adalah bukan institusi yang memiliki otoritas pendataan. Yang kedua Kementerian Perdagangan kurang lebih adanya di hilir, sehingga hulu dan tengah ini, saya kira, apalagi ada Badan Pangan Nasional, kita memberikan dukungan penuh agar Kementerian Perdagangan, Pimpinan, kalau bisa mendapatkan dukungan yang lebih dari politik anggaran, saya kira itu akan lebih baik.

Yang kedua adalah dalam forum ini memang tidak ada kaitannya secara langsung dengan Kementerian Perdagangan, namun pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh rekan sebelumnya, bahwa data yang digunakan oleh Kementerian Perdagangan pada akhirnya adalah data yang diperoleh dari beberapa institusi yang memiliki otoritas pendataan. Salah satu institusi yang penting adalah Badan Pusat Statistik, yang sudah melakukan dua pendataan penting dalam rangka menuju Satu Data Indonesia, yang ini keinginan presiden, kita mempunyai Satu Data Indonesia. Lalu kemudian menjadi satu data yang digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga tidak ada tumpang-tindih data, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan sebelumnya.

Anggaran untuk Regsosek, kalau anggaran untuk Kementerian Perdagangan dalam satu tahun dengan pasar rakyatnya, dengan semua persoalannya, saya kira 2,4 triliun. Anggaran untuk Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) menelan anggaran sebanyak 4 triliun.

Dan kemudian ada satu lagi, menyangkut tadi, soal pertanian, hasil pangan, dan hasil pertanian, menelan anggaran di 2023 sebesar 3 triliun. Kami mohon bantuan barangkali, Menteri Perdagangan bisa memberikan data dari BPS untuk berkomunikasi. Karena penting bagi kita dari sisi politik pengawasan, juga politik anggaran, untuk mengetahui secara detail, basis data yang digunakan yang berasal dari BPS yang telah menelan anggaran 4 triliun untuk Regsosek dan 3 triliun untuk sensus pertanian 2023.

Saya *live* saat ini di medsos, karena ini juga rapat terbuka, sehingga kami memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, karena data ini akan digunakan, sekali lagi, untuk, oleh seluruh kementerian dan lembaga, dan data ini menyangkut data registrasi sosial ekonomi seluruh rakyat, yang akan digunakan sebagai basis data APBN 2024. Dan juga sebagai basis salah satu basis data dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, dengan anggaran triliunan rupiah. Sehingga kita bisa sama-sama meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar itu, yang sangat jauh dari alokasi

anggaran untuk Kementerian Perdagangan yang mengurus perdagangan rakyat, termasuk pasar-pasar desa di seluruh tanah air.

Demikian dukungan yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan pula melalui Kementerian Perdagangan, agar kami mendapatkan data Regsosek dan data pertanian yang telah menelan anggaran kurang lebih total artinya 7 triliun, tapi tematik saja, yang menjadi bidang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Terima kasih, Bapak, selamat bertugas, Kementerian Perdagangan beserta seluruh jajarannya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, *barakallah* untuk kita semua.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Ibu Rieke Diah Pitaloka.

Dari *floor* sudah semuanya, Pak Menteri, sudah menyampaikan pendalaman. Dari meja Pimpinan, Pak Martin. Silakan.

F- P. NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Sarmuji.

Juga Pak Menteri yang kami hormati,
Pak Wamen dan seluruh jajaran,

Saya ada dua topik, Pak Menteri, ingin saya tanyakan. Dan saya dengar tadi belum ditanyakan oleh kawan-kawan juga. Yang pertama, soal harga eceran tertinggi, yang menurut saya, banyak yang sebenarnya sudah tidak *up to date* lagi, sudah cukup lama angka itu. Ini juga saya sudah suarakan juga beberapa kali dalam rapat dengan Menteri Perdagangan. Sebagai contoh misalnya ya, seperti HET minyak goreng yang angkanya 14 ribu. *Nah*, sampai sekarang, saya rasa belum bisa tercapai juga 14 ribu, karena di Minyak Kita sendiri, saya cek, kisaran 15 ribu, minyak goreng premium 20 ribu, ya kan, bahkan curah sendiri 14.800. *Nah*, artinya memang sebenarnya dari sisi *market*, ya tidak, memang tidak akan bisa tercapai 14 ribu. *Nah*, menurut saya, harga eceran tertinggi yang seperti ini supaya jangan hanya tertulis di kertas dan kita sungguh-sungguh bisa melaksanakan, sebenarnya sudah harus dicek bagaimana sebenarnya kondisi di pasar, ya, jadi jangan hanya ada di, katakanlah, di kertas, harga tersebut.

Nah, yang kedua, Pak Menteri, kami menerima surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang sudah berakhir masa tugasnya. Dan surat yang kami terima itu juga ada kepada Bapak Presiden, dari BPKN. *Nah*, sampai sekarang, tadi saya cek, di Sekretariat belum ada surat dari Pak Menteri kepada kami, karena memang sesuai dengan undang-undang, untuk dikonsultasikan kepada DPR. Jadi saya kira ini juga perlu kita kejar, agar BPKN ini juga bisa tetap berfungsi. Walaupun memang Undang-Undang Perlindungannya masih sedang kita bahas, tapi biar bagaimana pun, menurut undang-undang yang berlaku, ada

Badan Perlindungan Konsumen dan saya kira kita harus lakukan sesuai dengan undang-undang.

Saya pikir itu dua poin dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sarmuji sebagai Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Martin.

Dari saya, tidak ada yang spesial, Pak Menteri. Hanya saya, hanya saja sebenarnya kita menyayangkan turunnya pagu anggaran untuk Kementerian Perdagangan, mengingat tugas-tugas Kementerian Perdagangan itu sangat penting, terutama untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Dan sebenarnya kita semua merasakan, dari kawan-kawan tadi juga sudah menyampaikan, ada peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan selama setahun ini. Logikanya, seharusnya kalau ada peningkatan kinerja, mestinya ada insentif berupa tambahan anggaran, supaya kinerjanya tetap terjaga, Pak Menteri. Jadi kalau kinerjanya bagus, justru ada disinsentif, ini kan sebenarnya *enggak fair* juga. Harusnya kita bisa menambahkan anggaran untuk Kementerian Perdagangan, tetapi justru yang terjadi adalah penurunan anggaran yang cukup signifikan sebesar 20,17%, ini turun yang sangat signifikan.

Baik, itu saja, Pak Menteri, pendalaman dari seluruh anggota, silakan ditanggapi. Mungkin tidak harus semuanya ditanggapi, khusus untuk pembahas, agenda pembahasan anggaran dan laporan kinerja penyerapan anggaran mungkin harus disampaikan pada forum kali ini. Yang penting-penting silakan dijawab, yang detail, yang terlalu detail, mungkin bisa dijawab secara tertulis.

Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua dan Anggota DPR yang terhormat,

Nanti kami akan jawab tertulis, tapi yang perlu disampaikan secara terbuka, saya akan sampaikan terbuka. Mengenai BPKN, surat dari Presiden melalui Mensetneg sudah dikirim ke DPR, sudah di Pimpinan, bisa tanya ke Pimpinan, Pak, katanya *udah* sebulan lebih. Iya, iya, bisa ditanya, Pak, suratnya, ini kata Pak Sekjen ya, barusan saya tanya, "Ke mana surat? di DPR, Pak, *gitu*, di Pimpinan, Pak, *gitu*".

Yang kedua, saya perlu juga jelaskan secara umum, *kenapa* perjanjian-perjanjian itu penting, itu saya tekuni betul soal ini, karena Indonesia ini negara yang sangat terbuka, kita ini. Yang *enggak* masuk ke Indonesia itu *enggak* ada, apa *aja* sampai ke tempat kita ini, itu, jadi sudah begitu terbuka. Tentu imbangannya, kita harus juga diterima oleh negara-negara itu produk-produk kita, produk kita juga harus. Jadi tanpa perjanjian itu, kita memang sudah jadi *supermarket*. Kurang ini, impor, *gitu*, *udah* biasa, cabai kurang, impor, lengkung kurang, impor, ya *kan*, *gitu*. Terigu dari 2 juta sekarang sudah 13 juta. Bahkan baru-baru baju bekas impor, *enggak* boleh, ya *nyelundup*, itu memang, kita itu, karena mungkin kepulauan, Pak Ketua. Juga begitu, minuman apa saja, ada. Makanan apa saja ada, *gitu*, tempat kita. Karena mungkin kepulauan, jalan tikusnya, pintunya banyak. Ya sudah, itu sudah terjadi. Dan sekarang imbalannya kita juga harus bisa masuk ke tempat mereka, *gitu*, kalau tidak ya, kita akan menjadi negara konsumen. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian harus kita selesaikan.

Saya ambil contoh, betapa ruginya kita, misalnya, yang belum selesai-selesai itu EU CEPA, 9 tahun, Pak, ya. Kita itu ribut terus sama EU itu, ribut terus, sekarang dia mulai *kan* juga undang-undang apa, disebut dengan EU *Deforestasi*. Kalau kita ekspor kopi, kopinya ditanam di mana, harus ada sertifikatnya. Coklat kita ditanam di mana, *ngerusak* lingkungan dan tidak, pohonnya, begitu-begitulah, ruwet, yang itu mustahil dilakukan oleh petani. *Nah*, perjanjian-perjanjian itu *enggak* berhasil, ya berbagai faktor ya, ada di pemerintahan, ada di kita. Yang pandangan-pandangan kita mengenai nasionalisme itu kadang-kadang, kalau *enggak* tepat, malah menghambat. Gara-gara undang-undang itu tidak jadi-jadi, eh CEPA itu tidak jadi-jadi, kita dagangnya sama Vietnam, jauh. Vietnam itu empat kali lebih besar daripada Indonesia, Thailand itu tiga kali lebih besar daripada Indonesia dan EU, dagangnya. Saya ambil contoh, kalau kita kirim sepatu, kita kena 9%, Vietnam tidak, ya pabrik sepatu pindah, *gitu* ya. Kita kalau kirim tuna, Jepang *tuh* kita kena berapa, 20 ya? Kena 20%. Sementara kalau Thailand, tidak, karena mereka sudah punya perjanjian-perjanjian. Itulah yang saya ingin selesaikan sebetulnya, agar hambatan tarif perdagangan itu bisa kita selesaikan.

Saya ambil contoh, ASEAN, kita sudah selesai, perdagangan kita, naiknya luar biasa. Volume perdagangan kita dengan ASEAN itu rata-rata naik 20% lebih, terutama dengan Malaysia, dengan Filipin, juga Singapur, dan Thailand, naiknya itu sangat signifikan, 20%. *Nah*, itu mengenai perjanjian, penting untuk kita, *gitu*, karena tidak ada pun, kita tetap dibanjiri produk-produk itu oleh negara lain, *gitu*, itu yang perlu saya jelaskan, satu.

Yang kedua, tadi Nusron bagus sekali, mengenai survei, TPT *tuh* tekstil, yang kedua, limbah. Limbah *enggak* boleh, Pak, saya *enggak* kasih, saya *enggak* setuju ada survei limbah masuk ke Indonesia. Kita, saya, selagi di situ, saya tidak setuju. *Nah*, selama ini TPT itu, Pak, belum ada yang lain, memang yang *ngerjain* itu ya BUMN itu, konsorsium yang *dibikin* oleh BUMN. Jadi Pak Nusron tadi mungkin salah paham, sampai hari ini ya BUMN itu, *gitu*. Bagus apa tidak? Saya cuma cerita, makanya perlu ada alternatif, menurut saya.

Jadi ada, kebetulan ini yang kerja ini ponakan saya, namanya DPR juga, Alimin Abdullah, kerja di suatu perusahaanlah saya *enggak* sebut. Masuk di tekstil itu izinnya satu juta, tapi masuk lima juta, lima juta, Pak. Suatu saat ketahuan, maka PKTN perusahaan dicabut. Karena kenal, lapor kepada saya. Saya bilang "Ya kan kamu salah, wajar itu, *enggak* dipenjara *aja udah* bagus, *gitu*", "Iya, Pak". "Kenapa bisa begitu?" Dia bilang, dari dulu-dulu begitu, Pak, dari dulu-dulu begitu". "Loh kok sekarang bisa *enggak*?" "Karena petugasnya ganti", itu *aja*. Jadi saya mau marah, *enggak* jadi, *gitu*. *Nah*, oleh karena itu, ya itu pelakunya itu. Oleh karena itu menurut saya, perlu ada alternatif, kalau pendapat saya, tapi itu pun belum kami lakukan. Ya Pak Nusron sudah tanya, masih itu juga yang, yang survei itu masih, *gitu*, ini yang kedua.

Yang ketiga, soal bahan pokok. Memang Kemendag sekarang, Pak Ketua, sebagaimana kita ketahui, tugasnya sebetulnya jadi pendukung. Walaupun di mata publik, kalau harga naik itu tanggung jawabnya Kemendag. *Oke*, *enggak* masalah, saya juga tidak pernah menghindar, itu namanya tanggung jawab jabatan. Tapi kewenangan untuk pangan itu, sekarang sudah ada di Bapanas. Menentukan harga beras, harga gula, harga cabai, macam-macam itulah, itu ada di Bapanas. Penugasan-penugasan itu yang dulu Kemendag, tahun lalu ya? Tapi tahun 2022 akhir, sudah pindah ke Perpres berapa itu? Sudah pindah ke Bapanas. *Stock* beras, harga beras, kita itu mendukung. Jadi kalau Bapanas mengatakan, *stock*-nya perlu sekian, maka yang akan ditugaskan, Bapanas menugaskan pada Bulog, Bulog impor, masuk, apa, INSW, *ah* kita tinggal melaksanakan. Jadi sebetulnya kita itu di, di pendukung,

apa namanya, kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan. Tapi distribusi, tanggung kita, tanggung jawab kita, di distribusinya di perdagangannya. Tapi bagaimana pun, kami sekuat tenaga, karena Bapak Presiden *tuh* kalau pangan, itu hampir tiap hari, Pak, *ngurus* pangan itu. Pak Presiden juga pagi-pagi *tuh udah ngecek* harga, jadi ya Mendag *enggak* boleh, *enggak* boleh ketinggalan. *Nah*, oleh karena itu, memang kami juga punya data dari 500 pasar kabupaten, berapa harga-harga, dan sebagainya.

Harga *kok* naik? Ya memang mesti naik, Pak, *enggak* mungkin *enggak* naik, tapi naiknya ini yang ditata, yang diatur. Kita syukuri, kenaikan-kenaikan itu masih dalam inflasi yang terkendali. Tahun lalu, inflasi kita 5,5, tahun ini inflasi kita sampai Juli kemarin, 3%, jadi jauh daripada tahun lalu dan targetnya memang 3+1, mudah-mudahan bisa 2 sampai 4, ya mudah-mudahan bisa *enggak* lewat dari 4%. Jadi memang harga akan naik sekitar, sekitar inflasi itu.

Beras *gimana*? Memang beras ini, ini soal dampak psikologi, ada Elnino, India ini melarang ekspor beras, Pak, walaupun berasnya ada 7 juta, saya baru pulang dari India, dia ada beras 7 juta, *stock*-nya sebelumnya 4 juta, lebih dari cukup untuk *cover* mereka, 3 juta itu bisa diekspor, tapi tetap dilarang. *Nah*, sekarang India akan melarang juga gula. *Nah*, kalau itu tentu akan dampak psikologisnya akan besar. Bawang putih, Pak, mahal sekali, India melarang ekspor bawang putihnya sekarang, termasuk bawang bombai *enggak* boleh diekspor, jadi akan ada gejolak, bawang *tuh* mesti *gitu* ya. India akan pemilu, dia, India itu inflasinya cukup tinggi, kalau saya *enggak* salah, hampir, hampir 8%. Oleh karena itu, dengan segala cara, Pemerintah India yang terkait *panganan* akan dilarang untuk ekspor, agar harganya bisa turun, inflasinya bisa terkendali. Karena musuh semua pemerintahan itu inflasi, kalau mau pemilu itu inflasi, Pak, *gitu, nah*, itu dampak psikologis.

Beras kita cukup, kita punya 1,6 juta, karena ini perlu saya jelaskan, agar media bisa lihat, *enggak* usah khawatir, *enggak* usah panik, kita beras cukup, ada 1,6 juta, Pak. Tahun lalu cuma 500, kita khawatir, tapi sekarang 1,6 juta, mungkin akan masuk lagi sampai 400 ribu. Ini untuk me, dampak Elnino, beras ini makanan pokok ya, agar ada, tidak efek psikologis itu maka *stock*-nya diperkuat, keputusan rasis diputuskan oleh Bapak Presiden, agar *stock* kita bisa 2 juta, sekarang sudah 1,6 jadi *Insya Allah* aman. Dan September ini sekarang bulan ini, sudah dibagi ini, Pak, harusnya Oktober, kepada 20, hampir 30 juta KK, raskin, tiap KK nanti 10 kilo beras. Mestinya Oktober, tapi bulan ini sudah kita bagi, untuk menekan harga beras yang tadi naik itu.

Tadi ada pabrik beras modern Wilmar, *gitu*, memang ini, saya begini prinsipnya, kita boleh harga beras itu harus dijaga, memang tugas pemerintah, tapi jangan *ngorbankan* petani. Yang selama ini kan kita jaga inflasi, harga beras harus murah, tapi petaninya kan *enggak* bisa maju, Pak, itu, *nah*, ini *enggak* boleh lagi. Oleh karena itu dulu harga, namanya harga eceran, harga pembelian tertinggi, dulu. Jadi kalau Bulog beli gabah, 4.500, harga paling tinggi, Pak Ketua. Kalau Bulog beli beras 8 ribu, harga paling tinggi. Saya dalam rapat kabinet menyampaikan ke Presiden, Presiden setuju, dibalik. Pemerintah membeli gabah dan beras paling murah, bukan paling tinggi. *Nah*, sekarang sudah naik gabahnya jadi 5 ribu sekian, ya, anggap 5 ribulah, saya lupa tepatnya, jadi pemerintah membeli gabah paling murah 5 ribu, beli beras paling murah 9 ribu. Jadi kalau di pasar 10 ribu, Bulog boleh beli beras 10 ribu, Pak, *enggak* salah. Kalau gabah Wilmar beli 6 ribu, ya Bulog harus bisa beli 6 ribu, agar petani tidak rugi. *Masak* petani dibeli 6 ribu, dia harus jual 5 ribu, *kan endak*, kasihan. Selisihnya itulah yang disubsidi namanya. Jadi Bulog bisa beli 6 ribu gabahnya, jualnya 5 ribu, seribu itu yang disubsidi. Jadi yang *nanggung* selisih harganya itu ya pemerintah, bukan merugikan petani,

dan ini sudah. Maka sekarang, tidak ada petani yang protes, *enggak* ada. Boleh dicek di seluruh Indonesia tidak ada petani protes panen harganya murah, *enggak* ada lagi, *gitu*.

Nah, sekarang bagaimana kita menata agar pabrik yang rakyat itu tidak mati, *gitu* ya, dan harga beras terkendali, itu. Itu lagi ditata sekarang melalui jalur subsidi, *udah* kita hitung. Kalau subsidiya seribu, Pak, 2 juta itu baru 2 triliun. Itu tidak tinggi dibanding subsidi minyak, *gitu*. Subsidi minyak itu kita hampir 500 triliun, *gitu* dan yang dapat *kan*, saya dapat, Ibu Evita dapat, kita semua dapat, *gitu*.

Satu lagi yang kita akan tata, tapi belum selesai, Pak, karena memang swasembada itu sekarang kita alami. Dulu Ibu Meri di sini duduk, "Kita *enggak* swasembada *enggak* apa-apa, asal punya uang kita bisa beli". Sekarang punya uang pun, bisa *enggak* bisa beli, karena masing-masing negara kan mengamankan *gitu*. Rusia, Ukrain, gandum *enggak* mau jual, sekarang Vietnam, dia kurangi tanam berasnya, karena Elnino kering, padi itu memakan banyak air, jadi dia tanam padinya kalau dua musim, satu musim, karena dia *udah surplus*, *gitu*. *Nah*, kalau nanti *enggak* ada yang beli, kita *gimana*? Maka harus subsidi. Oleh karena itu nanti impor di bidang pangan pun mungkin masa yang akan datang, panjang, juga akan ditata, itu yang ketiga.

Yang keempat, oh tadi yang ke,

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya mau tanya sama Pak Menteri.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Apakah negara-negara yang kita impor beras dari negara tersebut, mereka sudah swasembada, Pak, berasnya?

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Udah, kalau *enggak*, dirayulah.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, sebenarnya kan kita bisa ke sana.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sangat.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ke swasembada itu.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Ya bisa.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Tetapi yang Bapak katakan tadi, gabah *enggak* punya masalah, biaya harga ini *enggak* punya masalah, yang punya masalah itu kan pupuk, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Nah kenapa ini secara nasional tidak diselesaikan, Pak Menteri?

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Nah, jadi saya cerita, Pak Ketua ya, India itu kan 1,4 miliar orang, Pak. Kita ini *kan*, Pak, ya dibayar oleh negara, *kan pengen* ada hasilnya, jadi menteri *kan enggak* lama, sebentar lagi juga selesai. India itu 1,4 miliar, bisa surplus berasnya, lebih, *gitu*. Saya tanya, "Kamu bagaimana", saya tanya perdagangannya itu menterinya. Dia cerita, semua pakai koperasi, *enggak* konglomerasi. Seluruh pertanian, itu koperasi. Pupuk, dia *enggak* pakai pabrik pupuk kayak kita, pupuknya itu di, di, dibuat oleh koperasi-koperasi, tapi penelitiannya oleh pemerintah. Dia pupuknya pakai pil, satu pil gini itu bisa untuk 2 hektar, kasih air, diproduksi oleh koperasi-koperasi. Tapi jelas, kebijakannya itu, dia tidak ada ambigu. Pokoknya petani subsidi *all out* habis-habisan, *gitu*.

Semuanya Pak, pupuknya, pupuknya, bunganya, semua, *enggak* ada tawar. Untuk dalam negeri, makan, mereka habis-habisan, itu. Kira-kira seperti orde barulah, irigasinya, pupuknya. *Nah*, kita *kan*, pupuk, diatur terlalu banyak, begitu sawah mau perlu pupuk, petani pupuknya *enggak* ada, nanti kalau panen, pupuknya ada. Ini *enggak kelar-kelar*, *enggak kelar-kelar*, dari dulu.

Kemudian obat-obatan Pak, obat-obatan harga pasar, di Vietnam, Pak, petani tanah pertanian itu lebih tinggi daripada taman nasional, lebih tinggi. Jadi kalau pertanian *enggak* boleh Pak jadi, jadi perumahan, jadi pabrik, *enggak* boleh. Dia kalau *udah* sawah, Pak, *enggak* boleh diubah-ubah selama-lamanya, *gitu*, lebih tinggi dari taman nasional, nilainya. Kita ada undang-undangnya, tapi ya masih itu *aja*, *gitu*, jadi, ya kalau kita serius bisa, bisa, itu beberapa contoh ya.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Menteri, interupsi sebentar ya.

Pak Ketua, jadi saya *kan* begini ini bingung *gitu loh*, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2003, 2023, itu nanti ada peraturan Dirjen Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk distribusi pupuk. Jadi ini *kan* harusnya dirapatkan dululah ke Bapak ini. Jadi sekarang ya, aturan yang dibuat baru, misalnya sistem *e-dubes*. Kalau di dalam KTP itu orangnya

meninggal, *jebret*, orang ini *udah enggak* bisa *nebus* pupuk, padahal tanahnya kan *enggak* ikut dikubur. Itu, Pak, diterangkan, Pak, saya, Pak, ini banyak masalah ini.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Ya, ya, ya, nanti, *enggak* ini saya sampaikan, saya kira untuk yang akan datang.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya ini Menteri Perdagangan ini, jadi...

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Untuk yang akan datang. *Nah*, terakhir ini, Pak, terakhir, Pak, yang lainnya kita tulis, karena ini perlu saya sampaikan secara terbuka. Kita memang sudah pasar bebas, Ibu Evita, dan memang tidak bisa lagi dengan cara-cara, apa namanya *tuh*, proteksionis dilarang, itu *endak* bisa. Karena dia sudah jadi satu. ASEAN, kita sudah, ini nanti besok kan presiden-presiden bahkan Modi dari India akan datang, semua akan datang. Karena Indonesia ini sekarang, terus-terang, kita bangga *loh* punya presiden Pak Jokowi itu. Betul, ya tentu karena saya menterinya, tapi bukan, hanya karena itu memang, memang berhasil, berhasil ini, kita di dunia itu dihormati sekali sekarang.

Nah, ASEAN ini setahap demi setahap akan seperti EU, akan dimulai dari digitalisasi yang bebas tarif, jadi nanti ASEAN itu *paperless*, bea cukainya satu, standar jasanya satu, standar kedokterannya satu, standar arsiteknya satu, sama, *gitu*, maksud saya, ya kan. Dengan Tiongkok begitu, dengan Jepang begitu, dengan macam-macam itu ya, sehingga ada imbalan. Dulu kan, dulu kan *free trade*, sekarang harus *fair*, perdagangan itu harus *fair* bukan *free* lagi, *fair*. *Nah*, oleh karena itu kita tidak bisa melarang-melarang itu, *udah* ada di WTO, *gitu* ya, kita bisa dikucilkan, itu susah sekali. Tetapi banyak instrumennya, instrumennya banyak, termasuk soal digital, termasuk *e-commerce*, *gitu*.

Beda dengan India, kalau India itu memang karena mungkin dia besar ya, kadang-kadang seenaknya dia, PD sekali itu, "Oh ini dilarang", Tiktok, larang aja sama dia, *gitu kan*. Ah ini ada, ada embargo dari barat, *enggak* boleh membeli produk-produknya Rusia dan Ukrain lagi perang, kalau India *enggak* ada urusan, beli *aja* dia begitu. Kalau kita kan tidak, kita lebih tertib. Tetapi kita bisa pakai instrumen, jadi karena Tiongkok sekarang ekonominya melambat, Pak Ketua. Melambat, berarti kan *over supply*, *over supply*, Pak. *Lah* Tiongkok itu, saya ini 83 *udah* dagang sama Tiongkok. Tiongkok itu beda sama kita, Tiongkok itu dagangnya, dia *enggak* mau pusing, kerja terus, Pak. Laku *enggak* laku, *dibikin* terus, itu Tiongkok. Mulai dulu, *bikin* terus aja, laku *enggak* laku, *enggak anu*, yang penting buat orang kerja produktivitas naik, *skill*-nya tambah bagus, produknya tambah bagus. *Nah*, akibat itu ya, bisa saja yang kita sebut *dumping* itu. *Masak blue jeans* misalnya harganya Rp5 ribu, *gitu*, ya. Ada alat-alat elektronik kalau kita *bikin* 500 ribu, dia bisa 50 ribu, *kan* kadang-kadang *enggak* mungkin. Saya juga dulu pernah, ceramic dulu dagangan saya itu, kalau kita *bikin* misalnya Rp2 ribu, dia bisa jual 200 perak, ya *enggak* mungkin.

Nah, oleh karena itu *kalo*, tadi betul sekali, Pak, Tiktok dia itu *socio commerce*, keuangan, perdagangan, sosial media, *waduh*, jadi satu. Itu kalau *enggak* diatur, *collapse*, Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya itu? Itu tiga bulan *aja tuh*, *beauty* kita nanti ya apa namanya, *collapse*. Oleh karena itu kami tata melalui, saya punya instrumen namanya peremdag. Saya

usul sebetulnya sama Pak Teten “Pak Teten *gimana* kalau kita larang saja?” “Oh iya juga ya, kalau larang-larang, *enggak* boleh sekarang, di kita, karena kita sudah masuk tadi itu WTO”, melarang itu, itu *enggak* bisa, pasti di *sue* di WTO. Iya, *ngatur* bisa, *nah*, itu. Jadi kita atur, saya sudah mengusulkan, Pak, aturannya. Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi *e-commerce*. Sosial media, sosial media saja. Kalau mau jadi *e-commerce*, harus izin lagi, dia mau dagang, beda *gitu*, harus pisah. Yang kedua, usulan kita, Pak, tapi kan harus dirapatkan di antar kementerian, nanti jadinya *kayak* apa, kita lihat.

Yang kedua, karena ini dari pelaku usaha UMKM minta ke kita, yang kedua *e-commerce* itu tidak boleh jadi produsen, dia kan sosial media, *enggak* boleh jadi produsen, kalau produsen ya harus izin sendiri, *gitu*, Pak. Yang ketiga, yang bisa langsung *direct* barang itu yang kita *enggak* punya *gitu*. Kalau yang kita punya, dia mau ya impor seperti biasa, seperti biasa, jadi kelihatan, maka disebut dengan *positive list*. Kita dulu *negative list*, Pak, *negative list* itu semua boleh, kecuali 1-2. *Nah*, Vietnam pintar, Vietnam itu dia *positive list*, yang boleh 1-2, lainnya *enggak* boleh, *gitu*. Ah kita tiru yang bagus kan kita tiru, *nah*, kita pakai, saya usulkan namanya *positive list*.

Berikutnya itu harus jelas, kalau dia dagang langsung itu harus ada standar produk, kalau profesor pesan barang dari dia, jaminannya siapa, perusahaannya di mana, memenuhi standar SNI apa tidak, ah itu juga *enggak* gampang. Jadi cara-cara itu kita pakai, iya.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak Menteri, *kenapa* *enggak* dibuat aturan, Pak Menteri? Jadi di *e-commerce* itu kalau itu barang impor, mereka harus sebut itu impor. Lokal, ini kan kita *enggak* ada sekarang, kadang-kadang kita *enggak* tahu ini barang impor *kah*, ini barang lokal *kah*. Itu mereka wajib mencantumkan kalau itu barang impor, kalau ini barang lokal, *gitu*.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Menarik juga *tuh*.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Identifikasinya.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya dicatat, Bu, menarik juga *tuh*, saya terus dulu ya? Ah jadi beberapa usulan kami ini, kalau ini tidak ditata, *e-commerce* yang ada paling enam bulan tutup semua, Pak, yang ada. Karena memang Tiktok ini luar biasa. Dia mau investasi tahun depan rencananya 10 miliar dolar, karena pasar kita kan besar ya, maka memang tidak ada pilihan, ya kita harus tata, di Amerika juga. Tapi saya tanya, ada teman saya Menteri Perdagangan Amerika *tuh*, Katherine Tai, saya bilang “*Kenapa* kamu dulu larang Tiktok?” dia kepada, Amerika *tuh* lebih pintarliah “Oh kami nanti itu kan data” *gitu*, dia *enggak* *ngomong* soal dagangnya tapi alasannya data, data apa *tuh*, warga Amerika takut diambil, kira-kira *gitu*. Itu yang keempat, Pak Ketua, saya kira itu saja, lainnya nanti kami akan jawab tertulis.

Sementara anggaran, Pak, kita turun, Pak, jadi apalagi yang mau saya bahas, dari 2,5 tinggal 1,9 *gitu*, ya sudah. Tapi saya apa namanya itu, apa, *melas aja* itu. Kita punya ITPC,

Pak, boleh ditanya di seluruh kedutaan, ITPC *tuh* pasti jadi andalan. Boleh ditanya. Seluruh kedutaan, perwakilan kita, di mana pun, coba, andalan perdagangannya mesti ITPC, *gitu*.

Terima kasih, Pak Ketua, selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Menteri, tentang Perpres Nomor 36 itu tadi *gimana*, Pak, jawabannya Bapak?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tentang devisa, Pak, tentang pencadangan devisa.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oh iya, ya itu penting, karena kalau devisa itu *enggak* masuk kan ya kita bagaimana cadangan devisanya. *Nah*, tapi itu diatur, *enggak* semua *ngendap*, ada diatur, *kan* ada nilai sekian-sekian, berapa, ada sekian-sekian, berapa, ada diatur. Dan itu kan kewenangan Menko, jadi saya *enggak* hafal detailnya.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Menteri ya, ini pertanyaan saya kan begini, ini kan bersumber dari sumber daya alam, termasuk perikanan. Jadi kalau kita ekspor ikan, itu kan hasil perikanan, padahal modal kita ini terbatas misalnya cuma 20 M, kita ekspor empat kontainer.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Kecil itu, *enggaklah*, Pak, *enggak* masuk.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

250 ribu Pak ini, ini nilainya satu kontainer itu kan 250 ribu.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bukan, yang ditahan itu ada nilainya, berapa ya, saya *enggak* hafal.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

250 ribu dollar.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Berapa? 250 ribu?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Gini aja, Pak Menteri, ini kan ada masukan, kan bukan kewenangannya Pak Menteri semata,

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bukan, bukan-bukan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi di ini saja, iya, dicatat saja.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Dengan jawaban dari Pak Menteri tadi, kita sudah bisa bacakan draf kesimpulan pada rapat kita hari ini, langsung saja yang pertama.

1. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan menyetujui pembahasan Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk penggabungan ketentuan-ketentuan perdagangan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme peraturan presiden.

Tadi udah kita setuju ya.

(KETUK PALU 1 KALI)

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Perdagangan RI mengenai realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dan pagu anggaran tahun anggaran 2024 Kementerian Perdagangan.

Setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Perdagangan RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor S-87/MK.02/2023 dan nomor sekian-sekian perihal pagu anggaran kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024, dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2024, Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.954.667.229.000,00 yang terdiri:
 - A. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.361.196.139.000,00,
 - B. Program perdagangan dalam negeri sebesar Rp276.251.340.000,00,
 - C. Program perdagangan luar negeri sebesar, ini salah itu Mas, dalam kurungnya salah itu, 9 harusnya 3 itu, Rp317.219.078.000,00.Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

4. Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja Kementerian agar percepatan realisasi anggaran tahun 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Oke ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

5. Komisi VI DPR RI, ini karena siklus *aja*, Pak Menteri, kalau boleh setuju sekarang saya setuju sekarang *enggak* usah rapat lagi sebenarnya. Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian Perdagangan RI akan melakukan pembahasan RKA K/L tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

(KETUK PALU 1 KALI)

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Izin tambahan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Iya mengenai tambahan anggaran untuk ITPC, rasanya bisa nanti waktu pembahasan final ini mulai dibicarakan, Pak Menteri. Karena tanpa tambahan anggaran, kasihan teman-teman kita yang di ITPC, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Atau paling tidak, ada alokasi yang dari pos-pos yang lain, bisa diarahkan ke ITPC.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, silakan nanti diatur di internal Pak Menteri. Dan kalau masih memungkinkan, silakan Pak Menteri *lobby* Badan Anggaran juga boleh.

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Saya memaklumi, Pak Ketua, karena memang dilihat yang Kemendag ini, saya tadinya *enggak* mengikuti, kalau saya *ngikuti*, saya juga bisa *ngomong* sama Menteri Keuangan sama

Presiden, cuma kan kemarin kan kita sibuk harga-harga *kan*, harga ada apa namanya minyak goreng, harga mau Natalan, tahun baru, Lebaran, saya *enggak kepikir* soal anggaran, saya *enggak* semua. Tapi memang di sisa masa jabatan presiden, itu banyak pekerjaan-pekerjaan, janji presiden yang belum selesai itu akan di *push* ke sana, misalnya IKN, pembangunan-pembangunan jalan, waduk, itu, itu, ini akan di, di apa diselesaikannya, tentu anggarannya *kan*, ya dari yang lain diambil. Dari sisi itu kita mengerti, hanya memang ada beberapa yang penting, harusnya *enggak* sebesar itu *gitu*, itu tapi ya sudah, *enggak* apa-apa, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, ya seprihatin-seprihatin kita, kita *enggak* bisa *teken sih* masalahnya, kalau bisa *teken*, saya *teken*, Pak Menteri. Baik.

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama lima hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Dengan demikian, selesai,

F- PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.):

Izin, Pimpinan, sebentar, sebentar

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

F- PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.):

Untuk yang tertulis, Pak, mohon dibantu tadi, melalui Kementerian Perdagangan, kami ulangi lagi, sudah ada sensus pertanian 2023 yang nilainya 3 triliun tadi, yang diadakan 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023 untuk memberikan gambaran kondisi sektor pertanian secara komprehensif, dengan tema “Mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”, antara lain ini mengenai tanaman, luas lahan, teknik budi daya, profil petani, dan juga nelayan, sehingga menyangkut juga perikanan dan peternakan, serta informasi UMKM, dan pelaku usaha di bidang pertanian. Mohon dibantu, karena kami bukan mitra BPS, tetapi Kemendag mempunyai hak secara yuridis untuk meminta data tersebut, sehingga nanti bisa disampaikan di dalam rapat berikutnya, Pimpinan, dan itu menjadi basis kita. Juga untuk memperjuangkan politik anggaran bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, sudah dicatat *kan*, Pak Menteri? Kalau belum dicatat, kita juga belum bisa mengakhiri rapat ini, Pak Menteri, kalau Teh Rieke begitu.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Dengan demikian selesai sudah rapat kita kali ini, Pak Menteri, mau ada *closing statement*?

MENTERI PERDAGANGAN (Dr. H.C. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya terima kasih banyak, Pak Ketua dan seluruh kawan-kawan Komisi VI, yang terus mendukung Kemendag, mudah-mudahan, kita tinggal setahun, dalam setahun ini ada beberapa hal yang penting termasuk EU CEPA itu. Saya besok mendampingi Presiden sampai tanggal 7, KTT ASEAN, kami bertemu juga termasuk mendampingi Modi, Perdana Menteri India. Tadi diangkat siapa ya tadi, soal apa, pinang itu, tadi ada yang *ngangkat*. Oh iya *enggak*, tadi barusan yang ekspor kita *anu* terganggu gara-gara *e-commerce* tadi? Bu Evita *kan* tadi ya, yang Sumut, Sumut? Bu Evita, iya, inang-inang, iya.

Ya kemudian saya diminta mendampingi juga, karena kita *udah enggak* boleh ke luar negeri, kita *udah enggak* boleh pergi kecuali mendampingi Presiden. Tanggal 8 tanggal 9, 10, G20 Summit di India, saya diminta mendampingi juga *gitu*. Saya terima kasih banyak, *gitu*, ya banyak PR yang masih dikerjakan walaupun tinggal setahun. Terutama prioritas mengenai EU CEPA itu. Karena kalau itu *enggak* kelar, kita punya, punya produk pertanian itu *loh*, Pak Ketua. Ya undang-undangnya akan berlaku bertahap mulai 2025, kita agak kesulitan kopi, lada, cengkeh, coklat, tentu minyak, minyak sawit ya dan lain-lain, itu bisa di *banned*, *gitu*. Oleh karena itu dengan perjanjian itu ini bisa selesai, kalau ini bisa selesai, itu akan masuk kita usahakan nanti, Pak ya, sehingga ini tidak menjadi hambatan dalam EU, Undang-Undang EU CEPA itu, apa, EU *Deforestasi* itu. Tentu juga soal pangan dan lain-lain.

Sekali lagi, saya terima kasih atas dukungan dan kebersamaan Komisi VI.

Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Baik, terima kasih, Pak Menteri.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin*, Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan saya nyatakan ditutup.

(KETUK PALU 3 KALI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.55 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001